

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak era tahun 1990-an organisasi sektor publik dituntut untuk tanggap terhadap pelayanan masyarakat dan dikelola secara akuntabel dan transparan. Organisasi sektor publik yakni sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Disebut organisasi sektor publik dikarenakan entitas tersebut memiliki dan mengelola sumber daya yang tidak kecil serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan (Dedi dan Hertianti, 2014).

Kementrian keuangan (Kemenkue) menyatakan terdapat beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran daerah tidak efisien. Dalam beberapa decade, anggaran transfer daerah sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi kenaikan dari belanja APBD dan transfer daerah tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, maka hal tersebut perlu diperbaiki agar lebih efektif dan efisien, optimal dan produktif (CNNIndonesia.com, 2017)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sejak tanggal 30 April tahun 2010 menuntut pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus mulai membuka diri terhadap berbagai informasi yang diperlukan masyarakat. Informasi publik ini harus dapat diakses, kecuali yang memang berdasarkan Undang-Undang tidak boleh dipublikasikan. Adanya keterbukaan informasi publik akan menjadi dasar dalam

membangun tata pemerintahan yang terbuka dan pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik, dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang (Mahmudi, 2013). Penekanan utama akuntabilitas sektor publik yakni pemberian informasi kepada publik dan konsituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas dalam sektor publik tersebut mampu mencegah berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Tidak hanya akuntabilitas yang diperlukan dalam layanan publik, di sisi lain transparansi di instansi pemerintah juga diperlukan. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama proses perencanaan, yang merupakan proses paling awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang masih mementingkan segelintir orang/golongan berakibat kegiatan pembangunan daerah tidak berdampak terhadap masyarakat luas. Pemerintah daerah dianggap kurang

mampu dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang telah dibuatnya kepada publik (masyarakat).

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Riyanti, 2017). Transparansi diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan untuk memperoleh, membina hubungan dengan pemerintah. Dengan kata lain transparansi merupakan bentuk keterbukaan layanan pemerintah kepada publik, yang tidak lain sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Tujuan adanya akuntabilitas dan transparansi pada organisasi sektor publik merupakan salah satu tolok ukur dalam pengukuran kinerja pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja pada program yang telah direalisasikan. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sementara pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari atasan langsung (kepala SKPD) yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawasan intern (Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)) dan pengawasan ektern (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)), dan pengawasan yang ketiga dilakukan oleh lembaga legislative (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja

pemerintah daerah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel. Pengawasan bisa dikatakan sebagai suatu proses pemantauan kinerja pegawai berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan standarnya untuk mengukur kinerja agar tidak adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai.

Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara setiap tahunnya secara rutin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kinerja tinggi dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja. Evaluasi kinerja juga dilakukan pada SKPD, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inseptorat melakukan evaluasi kinerja pada SKPD. Evaluasi kinerja SKPD sangat dibutuhkan untuk mengukur pencapaian kinerja SKPD dan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Namun sampai saat ini kinerja pemerintah dalam pengelolaan daerah masih terus ditingkatkan. Diantaranya, pemerintah Merauke merupakan system aplikasi Kasda (kas daerah) online dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai terobosan dalam peningkatan pelayanan dan upaya dalam pencapaian sistem keuangan daerah yang

baik. Adanya penerapan system aplikasi Kasda online untuk memberikan kemudahan dalam memantau transaksi keuangan daerah (Pasificpos.com, 2017).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah menuntut pemerintahan pusat ataupun daerah untuk menghasilkan informasi yang transparan dan akuntabel (Riyanti, 2017). Pemerintah telah menetapkan PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya aturan tersebut maka pemerintah pusat/daerah dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan publik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari sector publik yang selalu disoroti karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan, dan juga selalu merugi. Tidak hanya pengelolaan anggaran yang disoroti publik, akan tetapi kualitas kinerja terhadap pelayanan tidak memuaskan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab sector publik, meskipun tidak semua sector publik bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan dan Safri (2016). Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. penulis bermaksud menguji kembali apakah variabel-variabel

tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan intern secara simultan terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang?

1.3. Batasan Masalah

Agar masalah ini dapat dibahas dan mampu menyelesaikannya, maka diberikan Batasan masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan intern terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pangkalpinang.

1.4. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang.
4. Untuk membuktikan secara empiris akuntabilitas, transparansi dan pengawasan intern secara simultan terhadap kinerja OPD kota Pangkalpinang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang sektor publik. Para pembaca dapat lebih memahami tentang Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Intern dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta penelitian ini dapat dijadikan alat pembanding dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengembangan teori baik bagi akademisi maupun masyarakat umum.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga-lembaga terkait sebagai bahan masukan atau saran dalam melaksanakan kegiatannya agar kualitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah semakin baik.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait yaitu Dinas-dinas yang termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah, serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah kota dalam merumuskan suatu kebijakan.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat hingga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan teori-teori mengenai masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan intern, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis tentang penelitian tersebut.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan mengenai pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan tentang uraian deskriptif, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir, menyajikan tentang kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta saran-saran yang akan dipaparkan.

